

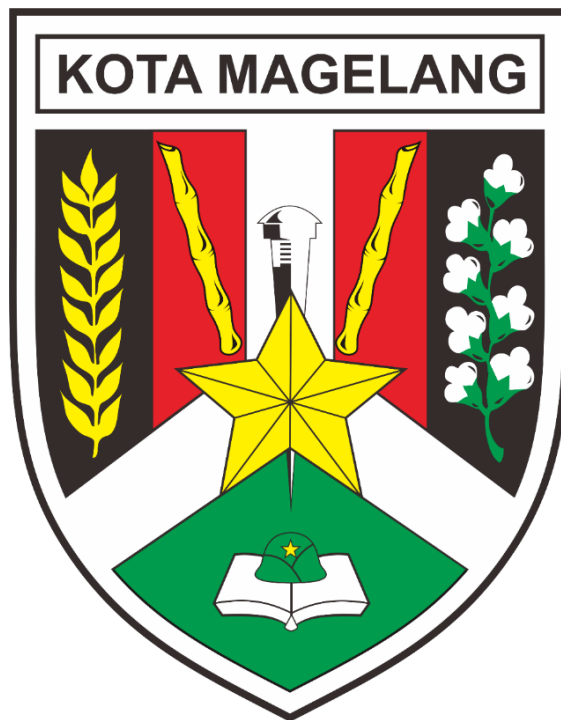


# RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023

**dpmptsp**  
Kota Magelang

JL VETERAN NO 7 KOTA MAGELANG  
WEBSITE: <https://dpmptsp.magelangkota.go.id/>  
SMS Center 0857-9999-6000  
56117

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAGELANG  
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAGELANG  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	.ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	23
3.3 Program dan Kegiatan .....	26
BAB IV : PENUTUP .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	7
Tabel 2.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP.....	12
Tabel 2.3	Kegiatan Baru Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	15
Tabel 2.4	Program Kegiatan Yang Berhubungan Masyarakat .....	17
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Tahun 2023 Pada DPMPTSP Kota Magelang.....	24
Tabel 3.2	Definisi Operasional Indikator Kinerja Daerah Pada DPMPTSP Kota Magelang.....	25
Tabel 3.3	Program Kegiatan Subkegiatan Indikatif Tahun 2023 .....	26
Tabel 3.4	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2023.....	30
Tabel 3.5	Rencana Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023 DPMPTSP Kota Magelang.....	35

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1	Arah Kebijakan Pembangunan .....	14
------------	----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu selama lima tahun (jangka menengah) yang berisi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi PD. Penjabaran tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra PD masih perlu dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal tersebut untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Program, kegiatan dan subkegiatan meliputi program, kegiatan dan subkegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan sebagaimana merupakan lokasi atau tempat dari setiap subkegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja terdiri dari

indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari kegiatan dan indikator subkegiatan memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan keluaran yang akan dicapai dari subkegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil subkegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program ,kegiatan dan subkegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP merupakan Perangkat Daerah dengan tipe B dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Secara efektif, DPMPTSP melaksanakan tugas dan fungsinya sejak 1 Januari 2017.

Tahun 2023 masuk dalam periode pembangunan jangka menengah daerah Kota Magelang tahap II, dengan arah kebijakan pembangunan ditujukan untuk pengembangan daya saing Daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya. Arah kebijakan ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2023 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2023,dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan rencana kerja karena adanya upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi maupun penyesuaian terhadap kebijakan pusat yang harus diimplementasikan didaerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024;
  23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
  24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
  26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun

- 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
  28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
  29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### 1. MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan perubahan dokumen perencanaan pada Tahun Anggaran 2023.

#### 2. TUJUAN

- a. Menyediakan acuan dan panduan dalam menentukan kinerja, prioritas, program dan kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2023;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2023;
- c. Memberikan gambaran kondisi umum Tahun 2023 dalam rangka turut mewujudkan Visi dan Misi Walikota serta Wakil Walikota Magelang;
- d. Memudahkan seluruh jajaran DPMPTSP Kota Magelang untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP adalah:

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022

Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan.

### BAB IV PENUTUP

Penutup.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD**

Pada tahun 2022, DPMPTSP Kota Magelang melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022**

<b>Tujuan/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	83.5	95.41	114.26%
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	4.5	2.74	139.11%
Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	16%	41.37%	258.56%
Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	3	16	533.33%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB	BB	100%
Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	71	79.55	112%

Kinerja tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan inovatif dan misi ke 4 yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Hasil capaian kinerja pada tahun 2022 dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tersebut diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja, dan dapat kita lihat bahwa seluruh indikator masuk dalam kategori sangat baik karena nilai capaian kinerja dari seluruh indikator berada diatas 100%.

1. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat didapat dari kegiatan Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan

oleh DPMPTSP Kota Magelang. Untuk memperoleh saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dilaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis online, yang selain bisa diisi secara langsung melalui website atau di ruang pelayanan MPP, juga link untuk mengisi survey dikirimkan melalui pesan singkat kepada masyarakat penerima layanan. Untuk nilai SKM di bulan Desember tahun 2022 95,41 nilai tersebut masih diatas target yang ditetapkan yaitu 83.5. Nilai tersebut diperoleh dari 108 responden pada bulan Desember 2022, sedangkan jumlah responden secara keseluruhan pada tahun 2022 adalah 1078 responden. Tercapainya indikator IKM Pelayanan Perizinan ini antara lain karena sudah terselenggaranya MPP dimana seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dan dinas teknis terkait sudah melaksanakan pelayanan di satu tempat yang memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat. Selain itu layanan perizinan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat juga disediakan dan pada akhir tahun 2022 kembali dilakukan penambahan layanan antara lain Kecamatan, UKPBJ, Pengadilan Negeri, pengadilan Agama dan Kejaksaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT. Taspen Persero, PLN dan PT. Pos Indonesia.

## 2. Rata-Rata Lama waktu Pelayanan Perizinan

Waktu Pelayanan Perizinan adalah ukuran waktu yang digunakan oleh pemohon izin dalam pengajuan suatu permohonan izin/layanan perizinan dan non perizinan dimulai dari berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan. Indikator Kinerja rata-rata lama waktu pelayanan perizinan pada tahun 2022 mencapai 2.74 hari dari target 4.5 hari yang telah ditetapkan. Lama waktu pelayanan perizinan tersebut dihitung dari 44 izin yang dilayani menggunakan aplikasi sicantik dari 72 izin yang dilayani di DPMPTSP dengan jumlah izin terbit 2678.

## 3. Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN

Indikator Kinerja pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN pada tahun 2022 mencapai 41.37% dari target 16% yang telah ditetapkan. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai investasi tahun sebelumnya, yaitu

sebesar 583.436.000.000 yang terdiri dari PMA 10.152.000.000 dan PMDN 573.284.000.000. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi investasi PMA/PMDN sebesar 823.515.425.921,- yang terdiri dari PMA 50.906.157.790 dan PMDN 772.609.268.131. Nilai investasi tersebut dari 3877 Perusahaan PMDN dan 2 Perusahaan PMA dengan penambahan nilai realisasi investasi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Laporan LKPM dilaksanakan melalui aplikasi OSS RBA sehingga satu sistem aplikasi ini digunakan dari proses perizinan hingga pelaporan LKPM yang diharapkan akan semakin memudahkan pengusaha dalam proses perizinan sampai pelaporan realisasi penanaman modal yang dilaksanakan.

#### 4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)

Indikator jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) sejumlah 16 perusahaan yang jauh melampaui target indikator kinerja yang ada di angka 3 investor berskala nasional (PMA/PMDN). Peningkatan jumlah investor baru ini karena dilakukannya peningkatan daya saing dan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi regulasi terkait penanaman modal, juga pemberian fasilitasi/kemudahan penanaman modal maupun penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang clean dan clear serta menarik bagi investor. Pelaksanaan promosi penanaman modal juga merupakan faktor yang mendukung dalam penambahan jumlah investor berskala nasional dan pada tahun 2022 terdapat 6 kepeminatan investasi yaitu : PT. Agra Megah Internasional , PT Eka Bogainti, Era Elektronik Magelang, Food Beverages Indonesia, PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, PT. Home Center Retail Indonesia.

#### 5. Hasil Penilaian SAKIP dan Nilai SAKIP

Evaluasi penilaian Hasil penilaian SAKIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai 79.55 dengan predikat BB sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk memperoleh predikat BB, namun dilihat dari nilai yang diperoleh mengalami peningkatan yang cukup baik dari nilai 72.54 menjadi 79.55. Hal tersebut dapat terwujud karena peran serta seluruh bagian untuk meningkatkan kualitas sampai dengan implementasi dari perencanaan yang telah disusun

sampai dengan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Penilaian SAKIP ini dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Isu-isu penting dan permasalahan yang diangkat pada lingkup Kota Magelang terkait urusan penanaman modal yaitu :

1. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lengkap, terintegrasi, modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen perizinan yang diperoleh di satu tempat. Dokumen perizinan tersebut antara lain: KTP, SIM, Paspor, Pajak kendaraan, PBG, perizinan berusaha, dll.
2. Meningkatkan sinergitas dengan perangkat daerah teknis untuk pemuktahiran peraturan perundangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja sehingga proses perizinan berusaha dapat dilayani dengan cepat, mudah dan transparan.
3. Meningkatkan Kompetensi petugas pelayanan, perangkat dinas Teknis yang terkait maupun pemahaman masyarakat terhadap implementasi OSS RBA dalam pelaksanaan perizinan berusaha sehingga proses perizinan berusaha akan menjadi mudah dan cepat .
4. Meningkatkan daya saing ekonomi dan iklim investasi

Daya saing merupakan kemampuan untuk dapat memiliki daya tarik sehingga akan memiliki nilai lebih tersendiri di dalam suatu persaingan. Daya saing daerah menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Terdapat 3 (tiga) komponen yang sangat berpengaruh:

- a. Kondusifitas wilayah berpengaruh pada keberanian investor untuk berinvestasi dengan memperhatikan dinamika angka kriminalitas beserta faktor pendukung lain yang menjamin kenyamanan berinvestasi. Di Kota Magelang, terus dilakukan upaya untuk menekan angka kriminalitas, serta didukung dengan peningkatan kualitas iman taqwa, dan religiusitas masyarakat.

- b. Keunggulan Komparatif lebih mengarah kepada bagaimana suatu daerah memanfaatkan keunggulan yang dimiliki di berbagai sektor untuk bersaing dengan daerah sekitar. Termasuk dalam hal ini keunggulan produk UMKM yang terus dilakukan pembinaan pada peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM sehingga menjadi lebih berani berinovasi terhadap produknya.
- c. Keunggulan kompetitif dengan indikator :
  - 1) makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja. Untuk mengatasi bonus demografi maka perlu dibukanya peluang kerja sebesar-besarnya.
  - 2) kualitas infrastruktur, yang dalam hal ini, infrastruktur Kota Magelang sudah terjaga untuk selalu dalam kondisi baik.
  - 3) kesehatan dan pendidikan dasar, yang tercermin dengan nilai IPM yang meskipun semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap diupayakan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanannya dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas.

#### 5. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan bertujuan untuk terjadi perubahan yang sistematis dan konsisten agar pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik. Salah satu area yang menjadi fokus reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk dalam komponen pengungkit pada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk dalam komponen hasilnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan



perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi percepatan layanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksana. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui implementasi system merit secara menyeluruh. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan manajemen SDM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus terwujud reformasi birokrasi untuk Kota Magelang yang lebih baik.

**Tabel 2.2**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Realisasi Investasi	Masih Rendahnya Minat Investor Untuk Berinvestasi di Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Strategi promosi PM yang kurang bervariasi</li> <li>2. Penyusunan strategi promosi PM yang belum optimal</li> <li>3. Fasilitas insentif dan kemudahan PM belum dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha</li> <li>4. Sosialisasi tentang perwal pemberian insentif dan Kemudahan PM belum optimal</li> <li>5. Peta potensi dan peluang investasi belum tergali secara maksimal</li> <li>6. Kurangnya pemahaman investor akan Peta potensi dan peluang investasi</li> <li>7. Belum semua peraturan dibuat atau diperbaharui</li> </ol>
		Belum diperbaharunya data penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan PM belum optimal</li> <li>2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem OSS RBA untuk LKPM</li> <li>3. Belum adanya reward dan punishment kepada pengusaha atas kepatuhan pelaporan LKPM</li> </ol>
		Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan belum terintegrasi dan terpadu di satu tempat</li> <li>2. Proses rekomendasi teknis masih membutuhkan waktu yang lama sehingga belum bisa diintegrasikan</li> </ol>

dalam satu sistem  
dengan standar lama  
pelayanan selama 5  
hari

3. Aplikasi Sistem  
pelayanan perizinan  
dikembangkan oleh  
pemerintah pusat  
sehingga integrasi  
dengan lembaga dan

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>instansi lain harus dikoordinasikan oleh pemerintah pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Aplikasi yang masih baru dan dianggap susah oleh masyarakat</li> <li>5. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap cara pengajuan izin secara online</li> <li>6. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi mengenai standar pelayanan dan prosedur penanganan pengaduan dan Jaringan internet masing-masing instansi yang terkadang mengalami gangguan sehingga berpengaruh terhadap lama waktu klarifikasi dan tindak lanjut, Selain itu aplikasi LAPOR dan MONGGO LAPOR belum terintegrasi sehingga pengaduan bisa terjadi duplikasi pada aplikasi tersebut</li> <li>7. Belum semua izin dilimpahkan ke DPMPTSP</li> <li>8. OPD Pengampu belum memahami peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perizinan harus dilimpahkan ke PTSP</li> <li>9. Kurangnya pemahaman OPD Teknis terhadap regulasi yang mengatur NSPK setiap ijin yang menjadi kewenangannya.</li> <li>10. Masyarakat masih belum memahami cara pengajuan izin usaha menggunakan aplikasi OSS RBA maupun izin non berusaha melalui aplikasi Si Cantik</li> </ol>

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih. Berdasarkan Visi Walikota Kota Magelang yaitu “ **MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**”. dengan 5 Misi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mendukung dalam Misi ke-3 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif dan Misi ke-4 yakni Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

**Grafik 2.1**



Tema pembangunan Kota Magelang Tahun 2023 adalah “Pembangunan Daya Saing Daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang memiliki keterkaitan sebagai berikut :

- Misi ke 3** : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.**
- Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif .
- Sasaran ke 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

**Misi ke 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.**

Tujuan : Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif .

Sasaran ke 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan Investasi

Merujuk pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 DPMPTSP merencanakan 6 program dengan 11 kegiatan dengan ditetapkannya pagu indikatif awal anggaran DPMPTSP Tahun 2023 sebesar Rp. 5.819.780.839,- sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

Pada perubahan rencana kerja tahun 2023 DPMPTSP merencanakan 6 program dengan 11 kegiatan, dimana pada 2 kegiatan terdapat penambahan anggaran untuk optimalisasi pencapaian indikator yaitu kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan ditetapkannya pagu indikatif anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 5.926.527.141,-

Adapun rincian penambahan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan rencana anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu di Mal Pelayanan Publik maupun untuk peningkatan daya saing Daerah :

**Tabel 2.3**

**Kegiatan Baru Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengadaan stand MPP yaitu stand Kecamatan, Sosialisasi MPP Digital, Capacity Building untuk Petugas Pelayanan.
3	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Kajian Akademik Pelaksanaan Pemberian Insentif Penanaman Modal

Selain adanya penambahan anggaran karena adanya beberapa kegiatan baru, juga adanya penambahan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan sampai akhir tahun maupun penambahan pada gaji THL sampai akhir tahun. Pengurangan anggaran juga dilakukan hampir di semua kegiatan dan sub kegiatan untuk efisiensi kecuali pada kegiatan yang bersifat rutin untuk mendukung operasional organisasi antara lain : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya karena untuk pemeliharaan aset masih belum proporsional dengan jumlah aset yang dimiliki sehingga banyak aset yang tidak terpelihara dengan optimal. Kedepan perlu dilakukan langkah-langkah inventarisasi aset yang sudah tidak berfungsi optimal untuk dilakukan penghapusan dan penggantian dengan aset baru.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Salah satu tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Layanan yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, bahkan melebihi harapan publik. Tahun 2023 tidak ada usulan Pokir atau hasil musrenbang yang diakomodir oleh DPMPTSP. Usulan yang diakomodir dari hasil FGD tingkat Kota yaitu terkait perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan untk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Selaras dengan tujuan tersebut, DPMPTSP Kota Magelang dalam rangka menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, antara lain melalui :

**Tabel 2.4**  
**Program Kegiatan Yang Berhubungan Masyarakat Langsung**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Ket</b>
Program Pelayanan Penanaman Modal			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Melayani masyarakat yang mengajukan perizinan berusaha dari memberikan informasi sampai dengan menerima berkas izin
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Memantau pemenuhan komitmen/persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon izin setelah diterbitkannya NIB (nomor induk berusaha) supaya terbit sertifikat standar. Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan kepada pelaku usaha
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Memberikan konsultasi dan menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait perizinan maupun penanaman modal

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Melayani pengusaha yang mengajukan permohonan fasilitas/insentif maupun kemudahan penanaman modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan sistem perizinan berbasis elektronik dengan memanfaatkan website, aplikasi, peralatan/mesin untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengajukan perizinan online, memantau proses perizinan secara online maupun menerima layanan informasi online
Program Pengendalian Pelaksanaan PM			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan sosialisasi /bimbingan teknis dengan mengundang pengusaha
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melakukan kunjungan kepada pelaku usaha dalam rangka pengawasan penanaman modal



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya”.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan pada pemantapan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PSE), pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM bersaing dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Beberapa strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran pembangunan antara lain:

1. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE);
2. Konvergensi program/kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan stunting;
3. Peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan peran BUMD, dengan lebih progresif, realistis, dan kondusif;

5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki visi yang akan diwujudkan di tahun 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluassasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebihberbudaya dan mencintai lingkungan.

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 disusun sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 diarahkan pada kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Negara. Adapun tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Selanjutnya prioritas nasional tahun 2023 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 – 6,0 persen; dan
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terdapat proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2023. Beberapa *major project* utama tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan yang membutuhkan dukungan antara lain:

1. Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi yaitu KEK Kendal, KI KendalSemarang-Demak, KI Brebes, KI Rembang, KI Cilacap, dan KI Kebumen, serta Kawasan Industri Terpadu Batang;
2. Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE (Meeting – Incentive – Conference – Exhibition) yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur dan sekitarnya;
3. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain jalan tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, jalan lintas Pansela, pembangunan KA Ekspres Jakarta – Semarang, dan pembangunan Bandara Ngloram Cepu;

4. Pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan (WM) Semarang; pembangunan Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Semarang (Kedungsepur) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

### **Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 mempertimbangkan kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat, perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada sektor pangan dan energi, pengetatan keuangan global yang mengakibatkan kenaikan inflasi global, kondisi triple challenges serta krisis pangan dan energi, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari**" yang dijabarkan dalam **prioritas daerah** tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun 2023 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Salah satu fokusnya dengan melakukan peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha. Prioritas daerah ini didukung oleh program program prioritas pembangunan daerah urusan penanaman modal meliputi:

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

- 3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - 4) Program Promosi Penanaman Modal;
  - 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Prioritas daerah ini didukung oleh program program prioritas pembangunan daerah urusan penanaman modal yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal.
  3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak.
  4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Prioritas daerah ini didukung oleh program program prioritas pembangunan daerah urusan penanaman modal yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. Tugas pokok DPMPTSP Kota Magelang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP melaksanakan fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu.

Selanjutnya penjabaran tugas pokok tersebut diwujudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja OPD Tahun 2023 sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RKPD Kota Magelang tahun 2023. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Tahun 2023**  
**Pada DPMPTSP Kota Magelang**

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	2023 Target
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif</b>					
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan		IKM Pelayanan Perizinan	indeks	83,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	4
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD		Hasil Penilaian SAKIP		A
		Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP		80
<b>Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan</b>					
1	Meningkatnya investasi		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	%	16
		Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Investor	3

Definisi operasional dari setiap indikator tersebut serta cara perhitungannya dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Indikator Kinerja Daerah**  
**Pada DPMPTSP Kota Magelang**

No	Indikator Renstra	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	IKM Pelayanan Perizinan	<p><b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b> adalah data dan informasi tentang tingkat <b>kepuasan masyarakat</b> yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya</p>	Hasil Perhitungan dari 9 unsur sesuai Juknis dari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
2	Rata-rata lama waktu pelayanan perizinan	Waktu pelayanan perizinan adalah ukuran waktu yang telah digunakan oleh pemohon izin dalam pengajuan suatu permohonan izin/layanan perizinan dan non perizinan dimulai dari berkas diterima sampai dengan ijin diterbitkan	Jumlah waktu pelayanan perizinan/ Jumlah Izin
3	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri	$\text{Pertumbuhan investasi} = \frac{jml\ inves\ tn\ n - jml\ inves\ th\ (n - 1)}{jml\ inves\ th\ (n - 1)} \times 100\%$
4	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	<p>Investor berskala nasional adalah investor yang memiliki usaha di lebih dari satu daerah/Kab/Kota</p> <p>Target Investor berskala nasional periode 2022 – 2026 : 3 investor/tahun</p>	Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN tahun n

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dan mengacu pada pencapaian target indikator pada renstra, maka pada tahun ini direncanakan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikatif Tahun 2023**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Program Pelayanan Penanaman Modal		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	



	Kabupaten/Kota	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen

		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota	

		Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota
Program Promosi Penanaman Modal		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
Program Pengendalian Pelaksanaan PM		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Berikut adalah matriks Perubahan Rencana Kerja DPMP/TSP Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/178/112 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2022. Matriks tersebut selanjutnya

~~disandingkan dengan Rencana Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023 pada~~  
Perubahan Rencana Kerja DPMP/TSP Kota Magelang 30

Tabel 3.4 yang telah disusun sebelumnya.

**Tabel 3.4**  
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
2	1 8					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>															5.819.780.839	5.926.527.141		8.260.017.270
2	1 8 0 1					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															4.452.881.009	4.579.575.394		6.820.784.270
2	1 8 0 1	2. 01				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															13.050.300	10.473.300		15.616.260
2	1 8 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4.984.000	4.984.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	6.434.780			
2	1 8 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.148.000	537.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	1.317.690			
2	1 8 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.283.000	469.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	1.591.150			
2	1 8 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.308.000	918.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	1.713.360			
2	1 8 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.298.000	860.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	1.547.590			
2	1 8 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPF	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 laporan	2 laporan	8 dokumen	8 dokumen	3.029.300	2.704.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	3.011.690			
2	1 8 0 1	2. 02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															3.457.864.026	3.490.305.182		5.690.771.320	

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	26 orang	21 orang	15 Laporan	15 Laporan	3.448.433.026	3.482.875.682	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	5.681.789.740
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 laporan	1 laporan	15 Laporan	15 Laporan	1.998.000	1.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	2.000.000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/riwulan/Semesteran SKPD	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	13 laporan	13 laporan	15 Laporan	15 Laporan	6.542.000	4.957.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	6.500.000
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 laporan	1 laporan	15 Laporan	15 Laporan	891.000	473.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	481.580
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>118.151.700</b>	<b>109.467.300</b>				<b>133.010.460</b>
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	7 Paket	7 Paket	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.885.900	1.885.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	2.173.160
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	5 Paket	5 Paket	7 Kegiatan	7 Kegiatan	28.553.400	23.678.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	34.557.600
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	7 Paket	7 Paket	7 Kegiatan	7 Kegiatan	8.123.000	6.948.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	9.604.980
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	2 dokumen	3 dokumen	7 Kegiatan	7 Kegiatan	4.200.000	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	1.742.400
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Material	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	23 paket	23 paket	7 Kegiatan	7 Kegiatan	26.085.400	23.451.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	31.564.060
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	3.344.000	3.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	3.267.000
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	45.960.000	45.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	50.101.260

2	1	0	2.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>708.710.983</b>	<b>824.833.612</b>					<b>826.116.610</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4.630.800	4.100.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	423.500
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	514.979.000	583.051.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	559.673.400
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	189.101.183	237.681.812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	266.019.710
2	1	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>155.104.000</b>	<b>144.496.000</b>					<b>155.269.620</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	18 Unit	18 Unit	4 Jenis	4 Jenis	90.031.000	84.727.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	84.595.940
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	5 Unit	5 nit	4 Jenis	4 Jenis	42.413.000	37.109.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	55.949.190
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	1 Unit	1 Unit	4 Jenis	4 Jenis	750.000	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	1.500.000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	15 unit	15 unit	4 Jenis	4 Jenis	21.910.000	21.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	12 bulan	14.119.490
2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>										<b>382.456.000</b>	<b>362.465.500</b>					<b>384.928.000</b>	
2	1	0	2.		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>139.106.000</b>	<b>122.781.300</b>					<b>42.272.000</b>	
2	1	0	2.	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase investor PMDN/PMA	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	117.258.000	112.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase investor PMDN/PMA	100%	0
2	1	0	2.0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase investor PMDN/PMA	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100 %	100 %	21.848.000	9.787.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase investor PMDN/PMA	100 %	42.272.000

2	1	0	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>										<b>243.350.000</b>	<b>239.684.200</b>					<b>342.656.000</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor PMDN/PMA	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	40 %	40 %	79.030.000	76.399.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase investor PMDN/PMA	100 %	169.364.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase investor PMDN/PMA	Jumlah peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Prosentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	40 %	40 %	164.320.000	163.285.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase investor PMDN/PMA	100 %	173.292.000
2	1	0			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>										<b>178.454.000</b>	<b>160.846.500</b>					<b>418.813.000</b>	
2	1	0			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>178.454.000</b>	<b>160.846.500</b>					<b>418.813.000</b>	
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lol yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah kepedmintaan (LOI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 LOI	8 LOI	10 %	10 %	178.454.000	160.846.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lol yang ditindaklanjuti	100 %	418.813.000
2	1	0			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>										<b>316.237.023</b>	<b>363.052.648</b>					<b>443.937.000</b>	
2	1	0			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>										<b>316.237.023</b>	<b>363.052.648</b>					<b>443.937.000</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yg sesuai SOP	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	1300 Izin	2500 Izin	85 %	85 %	157.058.921	192.525.528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	94,5 %	200.000.000
2	1	0	2.0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yg sesuai SOP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan pemenuhan Komitmen perizinan berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	150 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha	85 %	85 %	103.750.181	105.956.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	94,5 %	171.519.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yg sesuai SOP	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	250 pemohon	800 pemohon	85 %	85 %	47.731.021	58.261.028	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	94,5 %	56.459.000



2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yg sesuai SOP	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/Insentif Daerah	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	2 Kegiatan Uaaha	2 Kegiatan Usaha	85 %	85 %	7.696.900	6.309.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	94,5 %	15.959.000
2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>											<b>440.927.807</b>	<b>420.413.099</b>					<b>101.555.000</b>
2	1	0	2.0		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>440.927.807</b>	<b>420.413.099</b>					<b>101.555.000</b>
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Prosentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20%	320 Orang	362 Orang	55 %	55 %	295.495.747	291.895.747	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	25 %	36.593.000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Prosentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	55 %	55 %	145.432.060	128.517.352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	25 %	64.962.000
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>											<b>48.825.000</b>	<b>40.174.000</b>					<b>90.000.000</b>
2	1	0	2.0		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>48.825.000</b>	<b>40.174.000</b>					<b>90.000.000</b>
2	1	0	2.0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha teintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Persentase Pengelolaan data, informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	10 %	10 %	10 data dan informasi	5 data dan informasi	85%	85%	48.825.000	40.174.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10 %	90.000.000
<b>TOTAL</b>																<b>7.143.491.000</b>	<b>7.350.554.348</b>					<b>8.260.017.270</b>

**Tabel 3.5**  
**Rencana Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Magelang**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	2023	Pengelola
										Target	
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif</b>											
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat kota						IKM	Indeks	84.41	Kepala
			Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan					IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	83.5	Kepala
				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non perizinan				Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	4	Kepala
									Hari	2	Kepala
					Program Pelayanan Penanaman Modal			Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai dengan SOP	%	94	Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	85	Sub Koordinator Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
							Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non- perizinan yang dilayani secara elektronik	Izin	2500	Sub Koordinator Administrasi Perizinan dan

No	Sasaran	Indikator	Tujuan OPD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan	2023	Pengelola
							secara Elektronik				Non Perizinan
							Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang dipantau pemenuhan komitmennya	Izin	100	Sub Koordinator Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pemohon	800	Sub Koordinator Penanganan Pengaduan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kepada perusahaan	Perusahaan	2	Sub Koordinator Peningkatan Layanan
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	%	10	Koordinator Penanaman Modal
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data, informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	%	85	Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal
							Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi media informasi dan memahami tata cara pengajuan izin  Jumlah data dan informasi PNP berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Orang  Data dan informasi	21122  5	Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif</b>											
2.			Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD					Hasil Penilaian SAKIP	Huruf	A	Kepala
				Meningkatnya Nilai AKIP				Nilai SAKIP	Angka	80	kepala
					Program Penunjang Urusan			Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	%	100	Sekretaris

No	Sasaran	Indikator	Tujuan OPD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan	2023	Pengelola
					Pemerintahan Daerah Kab/Kota						
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	dokumen	8	Sub Koordinator Program
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	dokumen	2	Sub Koordinator Program
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan OPD	Laporan	15	Sekretaris
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	Sekretaris
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Sekretaris
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulana/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	Laporan	13	Sekretaris
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	Sekretaris
						Administrasi Umum Perangkat		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan	7	Subag Umum

No	Sasaran	Indikator	Tujuan OPD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan	2023	Pengelola
						Daerah					
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	7	Subag Umum
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	5	Subag Umum
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	7	Subag Umum
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	3	Subag Umum
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Paket	23	Subag Umum
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Subag Umum
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Subag Umum
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	3	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	Subag Umum
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis	4	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorang dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kendaraan	18	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kendaraan	5	Subag Umum
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Buah	1	Subag Umum
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	Subag Umum

No	Sasaran	Indikator	Tujuan OPD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan	2023	Pengelola
<b>Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan</b>											
3.	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan investasi						Persentase pertumbuhan investasi	%	16	Kepala
			Meningkatnya investasi					Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	%	16	Kepala
				Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja				Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Investor	3	Kepala
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Prosentase investor PMA/PMDN	%	100	Koordinator Penanaman Modal
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	%	100	Koordinator Penanaman Modal
							Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	Dokumen	1	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Perusahaan	2	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	%	40	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator	Tujuan OPD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan	2023	Pengelola
							Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kab/kota	Dokumen	2	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
					Program Promosi Penanaman Modal			Persentase LOI yang ditindaklanjuti	%	100	Koordinator Penanaman Modal
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah kepedulian (LOI)	%	10	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan promosi PM kab/kota	LOI	8	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal
					Program Pengendalian Pelaksanaan PM			Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	20	Koordinator Penanaman Modal
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	55	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan PM	Perusahaan	362	Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	Perusahaan	100	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023. Rencana kerja ini secara substansial merupakan perencanaan tahun kedua pada pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dokumen ini telah menyelaraskan pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang tahun 2023.

Dalam perkembangannya apabila terdapat perubahan kondisi makro nasional maupun daerah atau terdapat kebijakan lainnya maka dimungkinkan untuk mengubah dokumen ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagai perubahan rencana kerja tahun 2023. Sebelum adanya perubahan dokumen ini maka rencana kerja ini digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan rencana kerja didahului dengan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, memperhatikan arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta target capaian rencana strategis Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, memperhitungkan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya serta mengacu pada perencanaan jangka panjang dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 DPMPTSP Kota Magelang melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp. 7.350.554.348 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), sesuai dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/178/112 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.

Dalam pelaksanaan diharapkan agar setiap pengelola kegiatan benar-benar mencermati dan melaksanakan rencana kerja yang telah tersusun dalam dokumen ini dengan sebaik-baiknya serta menjabarkannya dalam dokumen pelaksanaan lainnya termasuk dalam hal penganggaran dan pengaturan waktu pelaksanaannya. Diharapkan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana seluruhnya dengan memberikan manfaat dan capaian sasaran sebagaimana telah ditargetkan pada awal perencanaan.

Magelang, 23 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Magelang



KHUSHOIFAH, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650827 199003 2 005